

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH RIAU TAHUN 2013
(STUDI KASUS DI KELURAHAN BATANG SEROSA KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS)**

Oleh :

**SUSANTI
1101112361**

Email :Susantidk93@yahoo.co.id
Supervisor : Dr. Achmad Hidir, M. Si
Jurusan Ilmu Sosiologi- Prodi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus. Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru pekanbaru 28293.
Telp/fax 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Riau tahun 2013 di Kelurahan Batang Serosa, Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan cara menggunakan pengambilan data perempuan yang terdaftar di DPT di Kelurahan Batang Serosa, untuk mengetahui secara jelas faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kelurahan Batang Serosa tersebut. Untuk mengumpulkan data dari responden digunakan metode observasi langsung, wawancara, dokumentasi, kuisioner dan untuk pengelolaan data digunakan metode kuantitatif deskriptif. Pemerintah juga sudah berusaha dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam segala hal terutama dalam menggunakan hak suaranya atau pencoblosan suara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya perempuan-perempuan di Kelurahan Batang Serosa dalam partisipasi politik nya sangatlah kurang berpartisipasi politik khususnya saat menggunakan hak suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerahnya disebabkan oleh berbagai macam faktor terutama KPUD Kecamatan Mandau Kurang mensosialisasikan tata cara dalam pemilihan kepala daerahnya. Sehingga membuat perempuan terhambat dan tidak mengetahui tata cara dalam menggunakan hak suaranya yang benar.

Kata kunci : Partisipasi Politik, Perempuan, Pemilu.

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH RIAU TAHUN 2013
(STUDI KASUS DI KELURAHAN BATANG SEROSA KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS)**

SUSANTI

(Email :Susantidk93@yahoo.co.id)

Dosen Pembimbing : Dr. Achmad Hidir, M. Si

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This study aims to determine the factors that influence women's political participation in elections candidates for Governor and candidate for Vice Governor of Riau in 2013 in the village of Batang serous, research was conducted in the village of Batang Serous Mandau sub Bengkalis. This study used a descriptive quantitative method by using data retrieval women enrolled in the DPT in Sub Trunk serous, to know clearly what factors affect the political participation of women in the village Trunk Serous. To collect the data of the respondents used the method of direct observation, interviews, documentation, questionnaire and for the management of data used descriptive quantitative method. The government has also sought to increase the political participation of women in all respects, especially in using the right voice or sound pencbolosan. The results of this study are bahwasannya women in Sub Trunk Serous in his political participation is less political participation, especially when using the voting rights in the election of Governor and Deputy Governor of Riau in 2013, the lack of women's political participation in the election of regional heads is caused by various factors, especially Election Commission Mandau sub Less socialize procedures in elections daerahnya. So that makes women obstructed and do not know the procedures in the correct use of their voting rights.

Keywords : Political Participation , Women , General Election.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sampai sejauh ini kita telah mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam system politik. Partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi

politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintergrasian kebutuhan

gender dalam berbagai kebijakan public dan menggolkan instrumen hukum yang sensitive yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sector kehidupan.

System pemilihan umum yang dilakukan masyarakat Indonesia ketika memilih seorang pemimpin yaitu secara langsung dan terbuka. Semua hasil transparan dan tidak ada unsur kecurangan yang dilakukan. Partisipasi politik dalam pemilihan umum sangat diperlukan. Dengan adanya sumbangsi suara dari masyarakat maka para calon kandidat bisa menjadi pemenang dalam pemilihan umum tersebut. Dan ketika membahas mengenai system pemilihan umum itu erta kaitannya dengan perkembangan politik di masyarakat khususnya Negara Indonesia ini. Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan –tujuan kolektif. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Seperti ikut serta dalam memberikan hak suara, berpartisipasi dalam partai politik, dan mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan dalam pemilu.

Jika dilihat dari situasi masyarakat Indonesia saat ini kesadaran akan berpartisipasi dalam pemilu sangatlah rendah, masyarakat cenderung tidak mau tahu dan tidak peduli akan pentingnya pemilu, karena kebanyakan masyarakat berfikir pemilu itu tidak merubah nasib atau keadaan mereka. Kemudian selain itu, banyak teori dan pendapat dari para ahli politik dan social yang mengatakan; karakteristik social seseorang, seperti status social ekonomi, kelompok ras

atau etnik, usia, seks dan agama, baik mereka hidup di kota atau di pedesaan, semuanya akan mempengaruhi partisipasi politiknya.

Menurut Rush dan Althoff (1983) hierarki partisipasi yang berupa tingkatan itu, bukanlah merupakan prasyarat bagi jenis partisipasi suatu tingkatan berikutnya, walaupun mungkin berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu. Kemudian dari skema itu tampak bahwa bila hierarki partisipasi politik semakin ke atas semakin sedikit jumlahnya untuk diikuti oleh setiap individu.

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintergrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan public dan menghasilkan instrument hukum yang sensitive gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sector kehidupan. Partisipasi politik elit politik perempuan dalam pemilu bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja namun elit politik perempuan dalam kegiatan pemilu juga dimungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang lain. Hal ini didasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, kreatifitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya tersebut.

Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum (pemilu) disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan pada partisipasi politik

bisa diwujudkan. Studi kasus ini untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dan mengkaji beberapa hambatan perempuan dalam pemilihan umum.

Memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam politik yang dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi perempuan yang lebih besar dalam struktur partai politik. Hal ini diatur dalam undang-undang partai politik dan setiap partai politik wajib untuk mengikutinya sebagai bagian dari upaya keberpihakan kepada perempuan dan untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada perempuan untuk berpartisipasi politik.

Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik terutama dalam partisipasi pemilihan umum. Perempuan yang memiliki kapabilitas politik yang memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan. Banyak perempuan Indonesia tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk menentukan kualitas demokrasi di negara ini. Selain itu, mereka pun tak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hak politik mereka dan akhirnya memilih bungkam soal pemilu atau pun politik. Akibatnya, mereka tak bisa terlibat dalam pembuatan legislative yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak bisa terlibat dalam pembuatan legislaif yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak terwakili dengan baik di lembaga-lembaga pengambilan kebijakan. Sebagai

gambaran lemahnya partisipasi perempuan dalam politik (keterlibatan dalam parlemen),

“Pemilihan Gubernur” diartikan sebagai pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah pemilu putaran pertama dilakukan pada tanggal 4 september 2013 dan putaran keduanya pada tanggal 27 November 2013, yang mana itu merupakan salah satu pesta demokrasi di daerah Riau diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.12/2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32/2004, dan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 1 angka 1 PP No. 6/2005, menjelaskan : “ Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/ kota berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, yang telah dirubah dengan PP No. 49/2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6/2005.

Untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini komisi pemilihan umum (KPU) menugaskan kepala Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di masing-masing daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No. 12 tahun 2003, dalam melaksanakan tugas dan penyelenggraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD yang bersangkutan. secara organisasi KPU tetap dapat

melakukan tugas-tugas koordinasi dan supervise terhadap KPUD dan demikian juga KPUD Provinsi terhadap KPUD Kabupaten/kota, dalam pemilihan umum, persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh KPU adalah menyeleksi dan mengangkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), untuk selanjutnya PPK akan menyeleksi dan mengangkat panitia pemungutan suara (PPS) dan seterusnya PPS akan menyeleksi dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) disamping itu KPU Kota juga harus menginventarisasi seluruh TPS yang ada diseluruh kota Provinsi Riau dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan yang ada serta dengan jajaran keamanan, dan juga tidak kalah penting KPU juga berkoordinasi dengan pemerintah kota serta jajarannya. Adapun tahapan penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
2. Pencalonan
3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
4. Kampanye
5. Masa tenang
6. Pemungutan suara dan penghitungan suara
7. Penetapan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
8. Pengucapan sumpah atau janji kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. (Sovia Septiana,2013)

Bukan hanya partisipasi masyarakat yang menurun pada pilgub Riau tahun 2013. Partisipasi perempuan di Kelurahan Batang

Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam bentuk tabel.

Tabel 1.2
Perbandingan Pemilih Perempuan
Dalam Pilgub Riau Tahun 2013 Di
Kelurahan Batang Serosa

Desa /Kelurahan	Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Perempuan Yang Memilih Putaran 1	Jumlah Perempuan yang Memilih Putaran 2
Pematang Pudu	18114	5588	5243
Desa Air Jamban	25722	8790	8576
Desa Babussalam	15654	3987	3378
Desa Balik Alam	11987	2654	2155
Desa Batang Serosa	1055	124	113
Desa Duri Barat	12567	3890	3256
Desa Duru Timur	6876	2340	1980
Desa Gajah Sakti	9678	3465	3124
Desa Talang Mandi	11345	4765	4243
Desa Balai Makam	23978	8675	8143
Jumlah	137357	4324	40249

Sumber : KPU Mandau

Dari tabel diatas penulis melihat rendahnya partisipasi pemilihan perempuan dalam pilgub Riau tahun 2013 sangat rendah khususnya kelurahan Batang Serosa. Untuk

Kelurahan Batang Serosa jumlah pemilih perempuan dibandingkan dengan pemilih laki-laki sangat rendah. Jumlah daftar pemilih tetap 1055 fenomena ini menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul tentang Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013 Di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

B. RUMUSAN MASALAH

Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Riau 2013 di Kelurahan Batang Serosa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif karena penulis akan melakukan pendekatan kuantitatif karena penulis akan melakukan survey dan karena peneliti mengumpulkan data yang dapat diukur, seperti tinggi pendidikan, banyaknya jenis pekerjaan. Penelitian ini dianalisis dengan cara persentase terhadap alternatif jawaban yang diberikan responden. Data yang diperoleh dari kuisioner akan dianalisis, dijabarkan, dalam bentuk kalimat. Penelitian ini

bersifat penjelasan terhadap fenomena yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesis. Jadi disini peneliti bermaksud menafsirkan data yang ada, dan menjelaskan fenomena perempuan dalam partisipasi politik perempuan di kelurahan batang serosa. Sampel yang peneliti ambil 91 orang perempuan di setiap TPS perwakilan 13 perempuan dengan jumlah TPS 7.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan gejala permasalahan yang telah penulis temui diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah pokok yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yang selanjutnya yaitu : faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 di kelurahan batang serosa?

Tindakan perempuan dalam berpartisipasi politik, berjalannya pertumbuhan pembangunan social, ekonomi, dan politik di tingkat kehidupan local maupun nasional yang sudah pasti akan selalu memberikan suatu perubahan baik itu dalam konteks peningkatan segi pola pikir maupun pada segi kecakapan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Maka, dengan demikian secara tidak langsung akan serta merta menumbuhkan tingkat perubahan kinerja ataupun proses-proses terhadap peraturan dan kebijakan yang telah dibuat maupun yang akan diberlakukan didalam dinamika kehidupan masyarakat luas, terutama pada konteks kehidupan perempuan itu sendiri.

Selain faktor nilai budaya juga termasuk tindakan perempuan dalam berpartisipasi politik, nilai budaya yang dimaksud menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap politik sesuai teori suherizal, dalam buku : pemilukada : Regulasi, dinamika, dan konsep mendatang, 2011. Seperti kita ketahui di era modern ini, kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik sudah semakin menurun disebabkan berbagai macam hal. Terutama disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pemilih terhadap kandidat –kandidat yang akan mereka pilih dalam pemilukada maupun pemilu.

Persepsi perempuan terhadap politik sangat kurang diikuti dengan para pemimpin yang hanya memikirkan kekuasaan dari pada kesejahteraan masyarakat. Banyaknya pemimpin yang terlibat dan tersangkut kasus korupsi dan tindakan kejahatan lainnya sudah menjadi nilai negative masyarakat terutama bagi perempuan terhadap pemerintahan. Pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat cenderung menyebabkan menurunnya minat partisipasi politik. Masyarakat dalam partisipasi ingin mendapatkan sosok pemimpin yang mampu membawa masyarakat kearah perubahan dari setiap sector yang lebih baik lagi bukanlah sebaliknya.

Dalam hal ini, faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah Riau tahun 2013 di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator faktor partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah Riau tahun 2013, untuk mengetahui faktor apa saja yang

mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilukada di kelurahan batang serosa, sebelum ke faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilukada tentunya ada tiga tahap yang pertama sebelum pelaksanaan, pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan penulis juga ingin melihat ketiga tahap pemilukada apa ada hambatan internal maupun eksternal selama berpartisipasi politik dalam pemilukada.

1. Sebelum Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau Tahun 2013

Sebelum pelaksanaan pilkada tentu terdapat berbagai macam kendala-kendala atau hambatan partisipasi politik perempuan baik itu kendala pada proses pencoplosan, kendala pada saat kampanye, kendala pada saat mengikuti sosialisasi tata cara pemilihan kepala daerah, tata cara pencoplosan, maupun pengenalan calon kandidat yang akan dipilih maupun kendala lainnya.

Tabel 5.4
Kendala Sebelum Pelaksanaan Pilkada

N o	Ken dala Sebe lum pela ksan aan pilka da	Jum lah (Res pon den yang mem iliki kend ala)	Jum lah (Res pon den yang tida k mem iliki kend ala)	Pers enta se yan g me mili ki ken dala (%)	Pers enta se yan g tdk me mili ki ken dala (%)
1	Hamb atan dalam berpa rtisipa si	65	26	71,4 3%	28,5 7%

2	Hambatan dalam mencek daftar pemilih sementara	64	27	70,33%	29,60%
3	Kampanye	67	24	73,63%	26,37%
4	Sosialisasi tata cara pemilihan dari KPU D	65	26	71,43%	28,57%
5	Partisipasi pemangsaan baliho	24	67	26,37%	73,63%
6	Partisipasi pawai	28	63	30,76%	69,24%
7	pembagian poster	27	64	29,67%	70,33%

Sumber : Data Olahan Lapangan 2015

Dari tabel 5.4 diatas menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, sebagian besar responden menunjukkan memiliki kendala pada proses sebelum pelaksanaan pemilihan. Dilihat dari setiap indikator kendala persentase responden yang memiliki kendala lebih besar dari responden yang tidak

ada kendala. Pada indikator pertama, responden yang memiliki kendala menunjukkan persentase 71,43%, angka tersebut lebih tinggi dari persentase responden yang memiliki tidak ada kendala yaitu sebesar 28,57%. Begitu pula pada indikator-indikator lainnya yang menunjukkan responden yang memiliki kendala lebih sedikit dibandingkan responden yang memiliki kendala.

Lebih dalam lagi peneliti bertanya kepada responden mengapa ada hambatan dalam berpartisipasi politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, responden mengatakan hambatan dalam berpartisipasi politik disebabkan oleh berbagai macam kesibukan yang tidak bisa mereka tinggalkan sehingga membuat responden terhambat untuk ikut berpartisipasi politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 dan hambatan yang seperti ini termasuk kedalam jenis hambatan internal. Sedangkan yang tidak memiliki kendala dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 responden mengatakan pada saat pemilihan kelancaran, mereka hanya sekedar ikut-ikutan mencoblos saja.

Sementara itu hambatan dalam mencek daftar pemilih tetap (DPT) yang mengalami kendala dikarenakan responden sangat sulit melihat nama-nama mereka yang ada dipapan pengumuman di Kelurahan Batang Serosa dan kendala atau hambatan seperti ini termasuk kedalam jenis sifat hambatan eksternal. Sementara responden yang mengatakan tidak ada hambatan dalam mencek daftar pemilih tetap mengatakan mereka hanya menunggu undangan untuk hadir

dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013.

Sementara itu hambatan dalam kampanye yang mengalami kendala dikarenakan mereka malas berpanas-panasan untuk ikut proses kampanye, selain dari berpanas-panasan responden juga merasa saat kampanye para kandidat lebih menampilkan konser dangdut ketimbang visi-misinya saat proses kampanye, selain itu mereka mengatakan tidak adanya tempat penitipan anak-anak saat mereka mengikuti kampanye saat pilkada berlangsung, kendala atau hambatan seperti ini termasuk kedalam jenis sifat hambatan internal. Sementara responden yang tidak mengalami hambatan pada proses kampanye mengatakan mereka merasa disaat kampanye para kandidat lebih menampilkan hiburan dari pada mempromosikan visi-misi nya. Yang tidak ikut berkampanye karena mereka hanya ikut proses pencablosan saja.

Sementara itu hambatan dalam proses sosialisasi tata cara pemilihan oleh KPUD, peneliti lebih dalam lagi bertanya apakah mengalami hambatan dalam proses sosialisasi tata cara pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Mandau. Responden yang mengalami hambatan disebabkan oleh waktu yang diberikan oleh KPUD Mandau untuk melakukan sosialisasi tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 yang sangat sebentar dan hanya melakukan sosialisasi dengan langsung saja, tidak melibatkan atau mengikuti media elektronik untuk sosialisasi tata cara pemilihan yang benar. Kendala atau hambatan ini termasuk kedalam jenis hambatan yang bersifat eksternal. Responden

yang tidak mengalami hambatan pada proses sosialisasi tata cara pemilihan oleh KPUD Mandau mereka mengatakan tidak terlalu mengikuti proses sosialisasi tata cara pemilihan yang dilakukan oleh KPUD Mandau.

Sedangkan hambatan dalam pemasangan baliho peneliti lebih dalam lagi bertanya apakah mengalami hambatan dalam pemasangan baliho pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, responden mengatakan bahwa mengalami hambatan disebabkan oleh minimnya tempat pemasangan baliho yang disediakan oleh KPUD Mandau atau terbatasnya tempat mana saja yang dibolehkan. Selain itu keterbatasan biaya yang disediakan oleh kandidat dalam pemasangan baliho, dan hambatan seperti ini termasuk kedalam jenis hambatan yang bersifat eksternal. Responden yang tidak mengalami kendala pada pemasangan dikarenakan mereka tidak ikut serta dalam pemasangan baliho tersebut.

Sementara responden yang mengalami hambatan pada proses pawai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 disebabkan oleh jauhnya jalan yang mereka tempuh untuk mengikuti pawai tersebut, jenis hambatan seperti ini termasuk kedalam jenis hambatan yang bersifat internal. Sedangkan responden yang tidak mengalami hambatan pada pengikutan pawai mengatakan tidak terlibat atau tidak mengikuti pawai yang dilaksanakan oleh salah satu kandidat.

Sedangkan hambatan dalam pembagian poster peneliti lebih dalam lagi bertanya apakah mengalami hambatan dalam pembagian poster, responden yang

mejawab ada hambatan disebabkan karena poster akan dibagikan oleh responden tidak terlalu diminati oleh pemilih lainnya selain itu karena keterbatasan biaya yang diberikan oleh tim kampanye yang diberikan untuk pembagian poster, jenis hambatan seperti ini termasuk kedalam jenis hambatan yang bersifat eksternal. Sedangkan responden yang tidak mengalami hambatan pada pembagian poster dikarenakan responden hanya ikut dalam proses pencoblosan.

2. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013

Pada tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 setiap pemilih harus mengikuti proses-proses pada pemilihan tersebut. Dalam pelaksanaan ini masih banyak berbagai macam kendala-kendala pada partisipasi politik. Untuk mengetahui sejauh mana kendala pemilih perempuan terhadap pelaksanaan pemilu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Kendala Pelaksanaan pemilu

No	Kendala Saat pelaksanaan pilkada	Jumlah (Responden yang memiliki kendala)	Jumlah (Responden yang tidak memiliki kendala)	Persentase yang memiliki kendala (%)	Persentase yang tidak memiliki kendala (%)
1.	Selama proses nyobl	32	59	35,16	64,84

	os				
2	Ikut menyoblos	36	55	39,56	60,44
3	Termasuk Saksi salah satu kandidat	33	58	36,26	63,74
4	Kendala menjadi saksi salah satu kandidat	36	55	39,56	60,44
5	Mendapat undangan untuk datang pada pilkada	34	57	37,36	62,64

Sumber : Data Olahan Lapangan 2015

Dari tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa saat pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, sebagian besar responden menunjukkan tidak memiliki kendala pada proses saat pelaksanaan pemilihan. Dilihat dari setiap indikator kendala persentase responden yang tidak memiliki kendala lebih besar dari responden yang memiliki kendala. Pada indikator pertama, responden yang memiliki kendala menunjukkan persentase 35,16%, angka tersebut lebih rendah dari persentase

responden yang tidak memiliki kendala yaitu sebesar 64,84%. Begitu pula pada indikator-indikator lainnya yang menunjukkan responden yang memiliki kendala lebih sedikit dibandingkan responden yang tidak memiliki kendala.

Lebih dalam lagi peneliti bertanya adakah hambatan selama dalam proses menyoblos, responden yang mengatakan tidak ada hambatan selama proses menyoblos dikarenakan kemudahan dalam proses pencoblosan tersebut. Responden yang mengalami hambatan pada proses menyoblos dikarenakan oleh besarnya kertas surat suara yang harus mereka coblos (tusuk) dan banyaknya tahapan yang harus dilalui selama proses menyoblos sehingga membuat mereka merasa proses tersebut terlalu rumit dan hambatan seperti ini termasuk jenis hambatan eksternal.

Sedangkan responden yang mengalami hambatan menjadi saksi dalam penghitungan surat suara salah satu kandidat, responden yang mengatakan tidak ada hambatan menjadi saksi salah satu kandidat dikarenakan kemudahan selama menjadi saksi salah satu kandidat tersebut. Responden yang mengatakan ada hambatan selama menjadi saksi salah satu kandidat selama penghitungan surat suara dikarenakan penghitungan surat suara yang terlalu banyak prosesnya, dan hambatan seperti ini termasuk jenis hambatan internal.

Sedangkan responden yang mengalami hambatan mendapat undangan untuk datang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, lebih dalam lagi peneliti bertanya adakah hambatan mendapat undangan untuk datang pada pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Riau tahun 2013, responden yang mengatakan ada hambatan dikarenakan tidak mendapatkan undangan tersebut sehingga tidak bisa untuk ikut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, selain itu tidak terdaftarnya di DPT. hambatan seperti ini termasuk jenis hambatan yang bersifat eksternal, responden yang tidak ada hambatan mendapat undangan untuk datang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 dikarenakan responden terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

3. Sesudah Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013

Tabel 5.6
Kendala Sesudah Pelaksanaan
pemilukada

No	Kendala sesudah pelaksanaan pilkada	Jumlah (Responden yang memiliki kendala)	Jumlah (Responden yang tidak memiliki kendala)	Persentase yang memiliki kendala (%)	Persentase yang tidak memiliki kendala (%)
1	Penghitungan suara	36	55	39,56	60,44
2	Kecurangan	35	56	38,46	61,54
3	Quick count	30	61	32,96	67,04
4	Mengikuti quick count	29	62	31,86	68,14

5	Keefektifan quick count	30	61	32,96	67,04
---	-------------------------	----	----	-------	-------

Sumber : Data Olahan Lapangan 2015

Dari tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa sesudah pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013, sebagian besar responden menunjukkan tidak memiliki kendala pada proses sesudah pelaksanaan pemilihan. Dilihat dari setiap indikator kendala persentase responden yang tidak memiliki kendala lebih besar dari responden yang memiliki kendala.

Pada indikator pertama, responden yang memiliki kendala menunjukkan persentase 39,56%, angka tersebut lebih rendah dari persentase responden yang tidak memiliki kendala yaitu sebesar 60,44%. Begitu pula pada indikator-indikator lainnya yang menunjukkan responden yang memiliki kendala lebih sedikit dibandingkan responden yang tidak memiliki kendala.

Lebih dalam lagi peneliti bertanya kepada responden adakah hambatan sesudah pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 dalam hambatan penghitungan surat suara, responden mengatakan yang ada kendala dikarenakan dalam penghitungan surat suara disebabkan oleh panitia TPS yang terlalu membuat mereka bingung dengan proses penghitungan surat suara tersebut, hambatan seperti ini termasuk jenis hambatan eksternal. Sedangkan responden yang tidak ada hambatan selama penghitungan surat suara dikarenakan responden hanya mengikuti proses pencoblosan saja. Tidak mengikuti proses –proses setelah pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013.

Sementara hambatan lainnya sesudah pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 lebih dalam lagi peneliti bertanya adakah hambatan dalam quick count, responden yang mengatakan ada hambatan dikarenakan hasil quick count yang tidak begitu mereka mengerti, hambatan seperti ini termasuk sifat hambatan internal. Sedangkan yang tidak ada hambatan responden mengatakan karena mereka tidak terlalu mengikuti proses quick count tersebut.

Berikutnya peneliti bertanya lagi pada responden adakah hambatan dalam mengikuti quick count hasil penghitungan surat suara sementara, responden yang menjawab ada hambatan dikarenakan penghitungan hasil suara kandidat yang tidak efektif dan tidak adanya sosialisasi penghitungan suara oleh KPUD yang membuat mereka tidak mengerti membaca penghitungan suara melalui media elektronik. Hambatan seperti ini termasuk jenis sifat hambatan eksternal. Sementara yang tidak ada hambatan dalam mengikuti quick count responden mengatakan tidak terlalu mengikutinya.

Setelah penulis menjelaskan tiga tahapan dalam pemilukada maka penulis mencari dan meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilukada Riau tahun 2013 di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilukada Riau tahun 2013 di Kelurahan Batang Serosa :

Tabel 5.7
Faktor faktor Yang
Mempengaruhi Partisipasi Politik
Perempuan Dalam Pemilikada
Riau Tahun 2013

N o	Fakto r – fakto r	Juml ah Respo nden yang Terpe ngaru h	Juml ah Respo nden yang tidak Terpe ngaru h	Perse ntase respo nden yang terpe ngaru h (%)	Perse ntase respo nden yang tidak terpe ngaru h (%)
1	Ikatan emosi onal	67	24	73,62	26,38
2	Peson a kandi dat	68	23	74,72	25,28
3	Partai pendu kung	66	25	72,52	27,48
4	Perub ahan terhad ap daera h	65	26	71,42	28,58
5	Sikap kandi dat yang dipili h	63	28	69,23	30,77
6	Kebij akan redak si memp roduk si berita	60	31	65,93	34,07
7	Visi dan misi	58	33	63,73	36,27
8	Seran gan fajar	56	35	61,53	38,47

Sumber : Data Olahan Lapangan
2015

Dari tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden terpengaruh oleh faktor-faktor diatas diantaranya: Ikatan emosional, pesona kandidat, partai pendukung, perubahan terhadap

daerah, sikap kandidat yang terpilih, kebijakan redaksi memproduksi berita, visi-misi, dan serangan fajar. Besarnya jumlah responden yang terpengaruh dari pada jumlah responden yang tidak terpengaruh tersebut mengakibatkan tidak objektifnya hasil pemilihan kepala daerah tersebut, karena responden hanya terpengaruh oleh faktor-faktor internal tersebut diatas.

Lebih dalam lagi peneliti bertanya kepada responden apakah faktor ikatan emosional membuat anda terpengaruh dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, responden yang menjawab iya dikarenakan hanya melihat dari agama ataupun suku. Selain itu responden juga mengatakan bahwa memilih karena hanya ikut-ikutan saja. Sedangkan responden yang tidak terpengaruh oleh ikatan emosional dikarenakan memilih tidak melihat siapa yang satu suku atau pun satu agama. Mereka ikut berpartisipasi hanya karena ingin ada perubahan di daerah tempat tinggal mereka. Dari penjelasan diatas memilih atau responden melakukan suatu tindakan afektif, dimana tindakan afektif ini memilih melakukan suatu tindakan dengan emosional tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh.

Selain itu peneliti juga bertanya kepada responden apakah memilih salah satu kandidat, melihat dari pesona kandidat tersebut. Responden yang menjawab mempengaruhi pilihannya karena pesona kandidat dikarenakan ingin pilihan ada kharisma dalam masa kepemimpinanya, sedangkan responden yang mengatakan tidak

mempengaruhi pilihannya karena pesona kandidat dikarenakan hanya memilih saja dan tidak melihat pesona kandidat. Dari penjelasan diatas, responden melakukan suatu tindakan afektif. Karena responden memilih atau ikut dalam partisipasi politik untuk memilih kandidatnya hanya melihat pesona kandidat tersebut dimana tindakan afektif ini dikuasi oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan –pertimbangan akal budi. Seringkali dalam tindakan afektif ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh.

Selain itu peneliti juga bertanya apakah partai pendukung kandidat mempengaruhi pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, responden yang menjawab iya dikarenakan masih melihat partai pengusung yang biasanya partai pendukung itu membuat kandidat menang dalam pemilihan, sedangkan responden yang mengatakan tidak mempengaruhi pilihannya dikarenakan tidak begitu peduli oleh partai pendukungnya. Dari penjelasan diatas, responden memilih karena partai pendukung kandidat mempengaruhi pilihannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 tindakan yang dilakukan oleh responden adalah tindakan tradisional. Dimana tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakannya.

Sementara itu peneliti juga bertanya kepada responden apakah

perubahan terhadap daerah mempengaruhi pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, responden yang menjawab iya dikarenakan ingin ada perubahan dan kemajuan terhadap daerah tempat tinggal mereka, selain itu responden ingin pemimpin yang mereka pilih lebih memperhatikan daerahnya. Sementara yang menjawab tidak mempengaruhi pilihannya dikarenakan hanya memilih karena keterpaksaan. Dari penjelasan diatas, responden memilih karena ingin perubahan terhadap daerahnya yang membuat ikut memilih dalam pilkada tersebut, dimana didalam tindakan responden lakukan merupakan suatu tindakan tradisional yang masih memilih karena ingin adanya perubahan di daerahnya tersebut. Selain itu responden memilih atau terlibat dalam pemilihan suara hanya kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan.

Selain itu peneliti juga bertanya kepada responden apakah kebijakan redaksi dalam memproduksi berita-berita kandidat mempengaruhi pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, responden yang menjawab mempengaruhi dikarenakan tidak salah pilih dalam pemilihan kandidat, sementara yang tidak mempengaruhi dikarenakan tidak terlalu mengikuti berita kandidat. Dari penjelasan diatas, responden memilih atau ikut berpartisipasi politik melihat dan mendengar berita-berita maupun kebijakan redaksi dalam memproduksi berita-berita kandidat mempengaruhi pilihannya dalam

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013. Dimana di dalam tindakan responden lakukan merupakan suatu tindakan rasional instrumental dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai.

Selain itu peneliti juga bertanya apakah visi-misi kandidat mempengaruhi pilihan dalam pemilihan, responden yang menjawab mempengaruhi dikarenakan ingin ada perubahan dalam daerah. Sedangkan yang tidak mempengaruhi dikarenakan tidak terlalu peduli terhadap visi-misi kandidat responden mengatakan sebuah bukti nyata dalam kepemimpinan dan kerjanya selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih oleh masyarakatnya. Dari penjelasan diatas, responden memilih atau ikut berpartisipasi politik melihat dari visi –misi kandidat mempengaruhi pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013. Dimana didalam tindakan responden lakukan merupakan suatu tindakan tradisional.

Peneliti juga bertanya kepada responden apakah serangan fajar mempengaruhi pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, responden yang menjawab mempengaruhi dikarenakan faktor ekonomi dan menguntungkan bagi mereka dalam serangan fajar yang dilakukan oleh tim pemenang salah satu kandidat, tetapi mereka tetap tidak ikut dan memilih kandidat yang telah memberi uang pada mereka. Responden yang tidak mempengaruhi pada pemilihan dikarenakan tidak mau terhasut atau terpengaruh akan serangan fajar.

Dari penjelasan diatas, responden yang ikut berpartisipasi politik karena adanya serangan fajar mempengaruhi pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, dimana didalam tindakan responden lakukan merupakan tindakan tradisional. Yang masih mempengaruhi pilihannya dalam partisipasi politik.

Dari berbagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh responden dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, kebanyakan responden yang berpartisipasi politik dalam pemilihan kepala daerahnya tindakan tradisional dimana tindakan tradisional ini mempengaruhi pilihan-pilihan responden terhadap kandidat yang akan mereka pilih. Dalam tindakan tradisional ini mereka memilih atau pun terlibat dalam partisipasi politik masih melihat asal-usul kandidat yang akan mereka pilih dalam pemilihan kepala daerah berikutnya.

KESIMPULAN

penelitian yang berjudul partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah Riau tahun 2013. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Batang Serosa dengan sampel yang dipilih yakni semua TPS, yang jumlah keseluruhan TPS nya 7. Responden yang diteliti perempuan dengan latar belakang umur, agama, suku, pendidikan dan pekerjaan responden. Dari penelitian yang dilakukan terhadap responden kemudian data yang didapat dianalisis dan dilakukan pembahasan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahapan Pelaksanaan Pemilukada Riau tahun 2013 tidak berjalan dengan lancar. Ini terlihat dari ketidakpuasan pemilih perempuan terhadap KPUD mandau yang kurang mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilukada Riau tahun 2013, sehingga banyak kendala-kendala pemilih pada tahapan pelaksanaan pemilukada Riau tahun 2013.
2. Hasil olahan data lapangan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan pada pemilukada di Kelurahan Batang Serosa diantaranya yakni ikatan emosional, pesona kandidat, partai pendukung, perubahan terhadap daerah, kebijakan redaksi memproduksi berita, visi-misi kandidat, dan serangan fajar, serta tindakan perempuan dalam pemberian suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013. Dari berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan, peneliti melihat banyaknya faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013. Sehingga membuat rendahnya partisipasi politik perempuan terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013. Kurangnya partisipasi politik perempuan di Kelurahan Batang Serosa disebabkan oleh berbagai faktor yang telah dijelaskan diatas, selain itu tidak terdapatnya pemilih tetap (DPT), keengganan untuk ikut kembali

dalam pemilihan ulang dan faktor-faktor lainnya.

SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Kepada partai politik untuk memasukkan calon yang benar-benar pantas, agar masyarakat benar-benar berminat untuk memilih dan benar-benar ingin untuk berpartisipasi politik pada pemilukada.
2. Kepada kaum perempuan untuk lebih peka lagi terhadap politik, khususnya dalam berpartisipasi politik supaya kemajuan Daerah atau Negara dapat terwujud dan mengurangi tingkat golput dalam pemilukada.
3. Bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh partisipasi politik perempuan dalam pemilukada diharapkan untuk lebih mendalami penelitian dan lebih menambah variabel-variabel yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Bruce, A. Chodwick. 1991. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik.”* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Damsar. 2010. *“Pengantar Sosiologi Politik”*. Jakarta: Kencana
- Doroty, W. Cantor. 1998. *Women in Power*. Jakarta : PT Gramedia Utama.
- Iwanaga, Kazuki. 2008. *Introduction dalam Womens Political Participation and*

- Representation in Asia*. Copenhagen: Nias Press
- Prof. DR. J.M.Papasi. 2010. *Ilmu Politik teori dan praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana.
- Raga Maran, Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sihite Romany. 2007. *Perempuan, Kesenjangan, dan Keadilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Isbodrini. 1995. *Peranan Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Kajian Wanita dalam Pembangunan (T.O Ichromi ed)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sugihastuti. 2007. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarbani, Syahrizal, dkk. 2002. *"Sosiologi dan Politik"*. Jakarta: Gahlia Indonesia
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *"Metode Penelitian Sosial"*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ichromi, T.O. 1999. *Sosiologi keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Suko dkk. 2003. *Sosiologi Politik*. Surabaya: Yayasan Kampusina
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Mizan pustaka, Bandung.
- Ani Widyani Soetjipto. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Khofifah Indar Parawansa. 1999. *Peluang dan kendala perempuan di Sektor Politik, dalam Otonomi Perempuan Menolak Ortodoksi*. Penerbit LKPSM, Yogyakarta.
- Mariana Amiruddin. 2004. "Affirmative Action: menuju Masyarakat Demokratis". *Jurnal Perempuan*, cetakan pertama, Jakarta. Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Lovenduski, Joni 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ayu Putu Nantri. 2004. "Perempuan dan politik". *Jurnal Perempuan* (online).
(<http://www.gender> , diakses 20 November 2008).
- Kumpulan jurnal dan skripsi:**
- Jurnal Cakrawala Pendidikan, "Partisipasi Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Wanita". 1997.
- Jurnal Khofifah Indar Parawansa. *STUDI KASUS Hambatan terhadap Partisipasi politik Perempuan di Indonesia*.
- Dwi Windyastuti : 1999. Pengaruh sosialisasi gender pada wanita kelas menengah terhadap kesadaran politik.
- M. W. Resti Desion. Respon perempuan terhadap pemilihan kepala daerah.

- Ria angin : 1992. Faktor yang mempengaruhi persepsi wanita tentang partai politik.
- Sovia Septiana: 2013. *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011*. Skripsi.
- Sovia, Septiana. 2013. "Pemilukada: Rugulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang". Skripsi.
- Suwondo : 2009. Tentang penggunaan hak pilih masyarakat kabupaten Way Kanan pada pemilu tahun 2009.
- Undang-Undang:**
 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004
 Undang- Undang Nomor. 22 Tahun 2007